

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mencapai standar yang layak.

Kemiskinan masih menjadi tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi nasional suatu negara serta dinamika global. Globalisasi ekonomi dan meningkatnya ketergantungan antarnegara tidak hanya memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga membawa risiko serta ketidakpastian terhadap stabilitas ekonomi dunia.

Indonesia, kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang memiliki akses terbatas terhadap berbagai pilihan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Kemiskinan menjadi fokus utama pemerintah di berbagai negara dan terutama negara berkembang.

Masalah kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kebijakan pengupahan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, pengangguran yang tinggi, serta ketidaksesuaian antara kenaikan upah dan kapasitas produksi menjadi faktor penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Jawa Timur lebih

detail dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Grafik Presentase Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah**

Sumber: BPS Jawa Tengah

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Provinsi Jawa Tengah meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah menurun dari 17,48% pada tahun 2009 menjadi 10,77% pada tahun 2023. Meskipun tren menurun, fluktuasi tetap terjadi, terutama pada masa pandemi COVID-19, yang menunjukkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi.

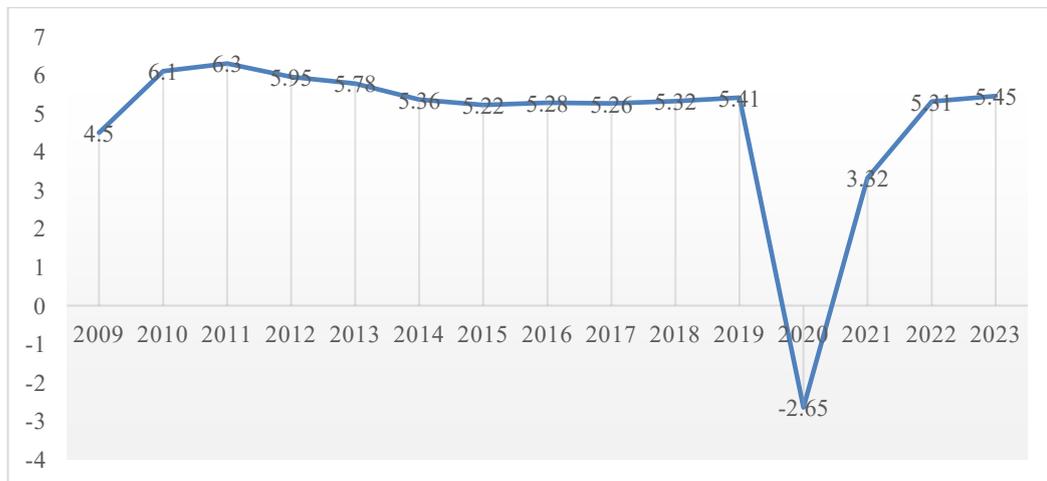


**Gambar 1.2 Grafik Penduduk Miskin Terbanyak di Provinsi Indonesia**

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 3.654.000 jiwa. Posisi pertama ditempati oleh Jawa Timur dengan 3.983.000 jiwa, disusul oleh Jawa Barat dengan 3.512.000 jiwa. Grafik berikut menampilkan 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia pada tahun 2024.

Salah satu provinsi yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional adalah Jawa Tengah. Dengan populasi lebih dari 34 juta jiwa, provinsi ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, meskipun mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, Jawa Tengah masih menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang kompleks.



**Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah**

Sumber: BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,5% dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2010 dan 2011, masing-masing sebesar 6,1% dan 6,3%, seiring dengan mulai pulihnya ekonomi nasional pascakrisis global 2008. Namun, sejak tahun 2012 hingga 2019, tren pertumbuhan

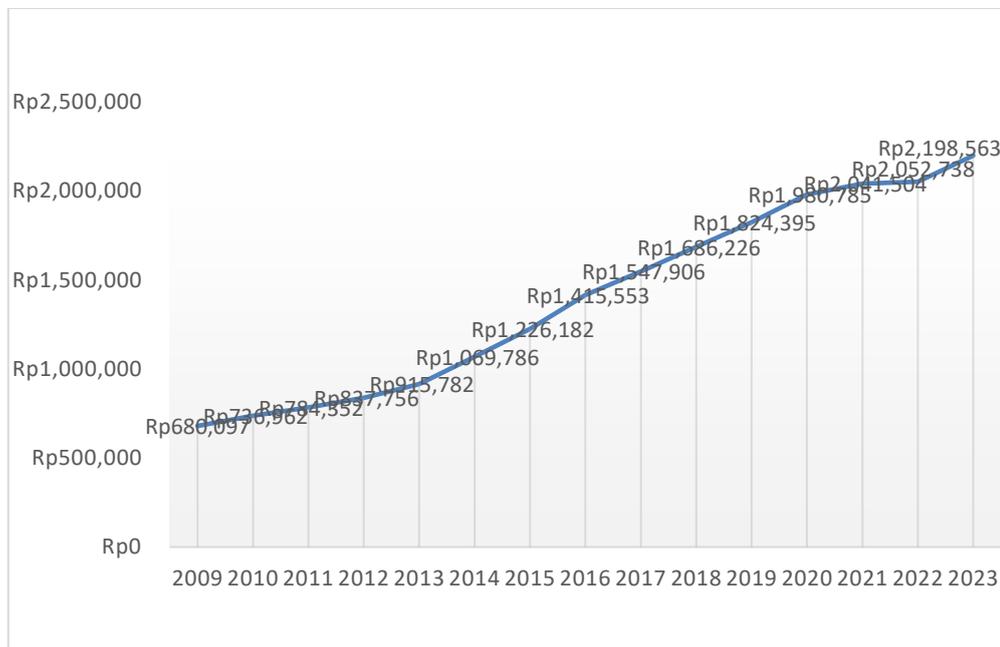
ekonomi cenderung melandai, stabil di kisaran 5,2% hingga 5,4%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global, perlambatan ekspor, dan ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu seperti industri pengolahan dan pertanian.

Puncaknya terjadi pada 2019 dengan pertumbuhan sebesar 5,41%, yang didorong oleh realisasi proyek-proyek strategis nasional dan peningkatan investasi. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memicu kontraksi ekonomi yang sangat tajam sebesar -2,65%, mencerminkan dampak luas dari pembatasan aktivitas ekonomi dan penurunan konsumsi rumah tangga serta ekspor. Kendati demikian, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan kapasitas pemulihan yang cukup kuat. Tahun 2021 mencatat rebound sebesar 3,62%, yang kemudian meningkat menjadi 5,31% pada 2022 dan 5,45% pada 2023. Pemulihan ini ditopang oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi, penguatan infrastruktur digital, pemulihan sektor UMKM, serta peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Jawa Tengah cukup resilien dalam menghadapi guncangan, ketergantungan pada sektor-sektor tradisional dan kerentanan terhadap faktor eksternal masih menjadi tantangan struktural yang perlu dibenahi melalui transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Adapun faktor lain yang turut memengaruhi dinamika sosial-ekonomi di Jawa Tengah adalah upah minimum. Upah minimum sering dianggap sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mengurangi kemiskinan. Berikut adalah ringkasan data upah minimum di Jawa

Tengah:

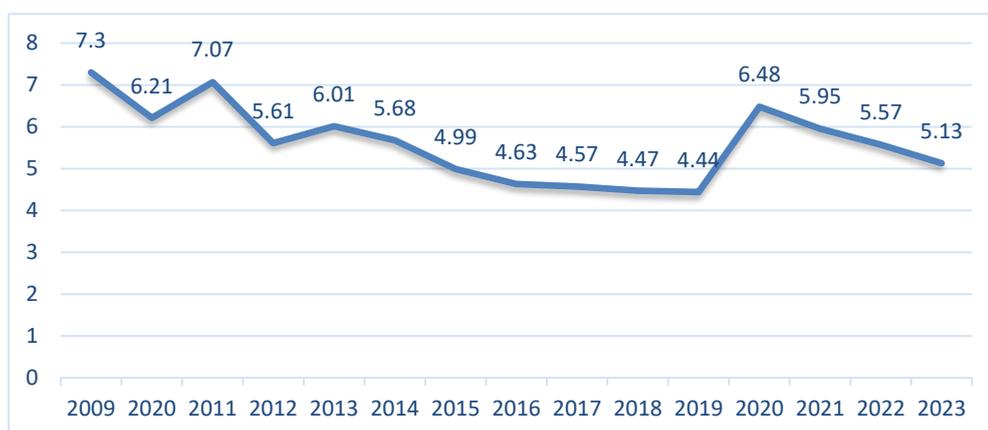


**Gambar 1.4. Grafik Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Sumber: BPS Jawa Tengah

Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2009 hingga 2023, mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para pekerja. Pada tahun 2009, upah minimum berada pada angka Rp680.097 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2014, upah minimum tercatat sebesar Rp1.069.786, menandai peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2009. Tren kenaikan ini berlanjut dengan lonjakan signifikan dalam satu dekade terakhir, di mana pada 2023 upah minimum mencapai Rp2.198.563.

Kenaikan upah yang cukup tajam, khususnya setelah tahun 2020, menunjukkan respons pemerintah daerah terhadap tekanan inflasi serta peningkatan kebutuhan hidup masyarakat pascapandemi. Misalnya, dari 2022 ke 2023, upah minimum naik sebesar lebih dari Rp145.000, yang merupakan salah satu kenaikan tertinggi dalam periode tersebut. Selain itu, kebijakan kenaikan upah ini juga diiringi oleh dorongan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri.



**Gambar 1.5. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah**

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2009 hingga 2023 memperlihatkan pola yang cenderung menurun secara umum, meskipun mengalami beberapa lonjakan pada tahun-tahun tertentu akibat dinamika ekonomi nasional maupun global. Pada tahun 2009, TPT berada pada angka yang cukup tinggi yaitu 7,3%. Angka ini kemudian menurun pada 2010 menjadi 6,21%, namun kembali meningkat menjadi 7,07% pada 2011 yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidakpastian pemulihan ekonomi global pascakrisis keuangan.

Sejak 2012 hingga 2019, TPT menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil. Dari angka 5,61% di tahun 2012, TPT menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah sebesar 4,44% pada 2019. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar kerja, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil serta peningkatan peluang kerja di sektor informal dan UMKM.

Namun, kondisi ini berubah drastis pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda, menyebabkan lonjakan TPT menjadi 6,48%. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan pariwisata, memicu meningkatnya jumlah pengangguran secara signifikan. Pemulihan mulai terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan TPT menurun menjadi 5,95% pada 2021, 5,57% pada 2022, dan akhirnya mencapai 5,13% pada 2023.

Pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum, dan tingkat pengangguran diduga memiliki peran penting dalam dinamika kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, upah minimum yang tidak seimbang dengan produktivitas, serta tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat penurunan angka kemiskinan secara efektif.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Jawa Tengah cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin secara absolut masih sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan serius. Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan realitas sosial seperti pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat menjadi indikasi bahwa kemiskinan di Jawa

Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai variabel ekonomi.

Oleh karena itu, penulis memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian, karena selain menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, provinsi ini juga memiliki dinamika ekonomi yang kompleks. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”**, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2009–2023. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menentukan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di tingkat daerah.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam menjawab permasalahan sosial-ekonomi yang nyata di masyarakat serta mendukung upaya kampus dalam menghasilkan lulusan yang peka terhadap isu-isu pembangunan daerah.

3. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bahan pertimbangan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah.